

Pemprov Tanggung Biaya Transportasi



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Selasa, 02/12/2025

Samarinda – Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur (DPPKUKM) akan menanggung biaya transportasi distribusi bahan pokok menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) ke Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). Kepala Dinas PPKUKM Kaltim, Heni Purwaningsih, menjelaskan bahwa kedua daerah tersebut sering kali terjadi perbedaan harga yang cukup signifikan dibandingkan wilayah lain di Kalimantan Timur.

Selain itu, kondisi geografisnya yang menantang sehingga menyulitkan akses distribusi barang kebutuhan pokok. “Jadi kita melakukan pengiriman atau distribusi barang kebutuhan pokok ke Kubar dan Mahulu itu, biaya transportnya kita tanggung seperti itu,” ujar Heni, Senin (1/12/2025). Dalam upaya menstabilkan harga, DPPKUKM juga akan melibatkan perusahaan daerah milik Pemerintah Provinsi Kaltim yaitu PT. Melati Bhakti Satya (MBS). Kolaborasi ini diharapkan dapat membantu menekan disparitas harga antara Samarinda dengan daerah-daerah terpencil.

“Sehingga harga barang kebutuhan pokok itu disini dengan di Kubar atau di Mahulu itu sama,” tambahnya. Heni juga bilang, memasuki bulan terakhir di tahun 2025 ini, pihaknya terus berupaya melakukan langkah-langkah stabilisasi harga dengan bersinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama pemerintah kabupaten dan kota secara simultan telah melakukan upaya masif untuk pengendalian dan stabilisasi harga. “Kita di akhir tahun ini, Desember ini, kita konsisten untuk melakukan upaya-upaya untuk operasi pasar ditambah dengan gerakan pangan murah dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura,” pungkas Heni.

Wilayah Mahulu dan Kubar kerap mengalami lonjakan harga pangan yang dipengaruhi cuaca dan kondisi geografisnya yang menantang sehingga menyulitkan akses distribusi barang kebutuhan pokok. Seperti yang terjadi belum lama ini. Krisis pangan menghantui

warga Mahakam Ulu, terutama di wilayah perbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Distribusi pangan yang sulit saat musim kemarau membuat harga beras 25 kilogram melonjak drastis hingga Rp1,3 juta per sak.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Mahakam Ulu, Drg Agustinus Teguh Santoso, mengatakan kondisi ini sudah berlangsung berulang. Hal tersebut berlangsung karena jalur sungai surut dan akses jalan darat belum terhubung sepenuhnya. “Beras yang biasanya sekitar Rp400 ribu, di perbatasan bisa mencapai Rp1,3 juta. Situasi ini membuat masyarakat semakin tertekan,” ujarnya, Selasa (2/9/2025).

Ia menambahkan, Mahakam Ulu masih menghadapi banyak keterbatasan. Infrastruktur jalan masih berupa tanah dan sulit dilalui ketika hujan, sedangkan jalur sungai menjadi berbahaya ketika debit air terlalu tinggi maupun rendah. Ia berharap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kali ini dapat memberi rekomendasi yang benar-benar menyentuh persoalan nyata di lapangan. “Kami sangat menantikan masukan dari BPK agar ketahanan pangan di Mahakam Ulu bisa diperkuat,” ujarnya. **(ray/nhn)**

Sumber berita:

1. TRIBUN KALTIM, Pemprov Tanggung Biaya Transportasi, 02/12/2025

Catatan:

1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU 18/2012) menyatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.
2. Dalam Pasal 12 ayat (1) UU 18/2012 diatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan.
3. Dalam Pasal 46 ayat (1) UU 18/2012 diatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.